HISTORIA VITAE
Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah

HISTORIA VITAE, *Vol. 03, No.02, Oktober 2023*

AKTIVITAS PERDAGANGAN KOPRA DI MANDAR 1946-1966

Abdul Rahman
Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia
Email: abdul.rahman8304@unm.ac.id

ABSTRAK

Pada awal kemerdekaan, Indonesia sedang dilanda masa-masa sulit karena sedang melakukan penataan dalam berbagai bidang. Kesulitan itu ditambah lagi dengan adanya berbagai gejolak di beberapa daerah yang menuntut otonomi daerah bahkan hendak melepaskan diri dari pemerintah Republik Indonesia. Sulawesi Selatan, khususnya di daerah Mandar tidak lepas dari gejolak tersebut, tetapi bukan berarti aktivitas ekonomi masyarakat mengelami kelumpuhan. Artikel ini berupaya untuk mengelaborasi sejarah perekonomian masyarakat Mandar yang menjadikan kopra sebagai komoditi utama. Untuk itu, maka penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah yaitu: penentuan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bangkitnya perdagangan kopra di daerah Mandar tidak dapat dilepaskan dari kondisi wilayah ini yang sangat subur sehingga tanaman kelapa sebagai bahan utama kopra banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Komoditi kopra telah meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. kesejahteraan masyarakat meningkat ditandai dengan banyaknya Jemaah haji dari daerah ini. Selain itu, komoditi kopra dijadikan pula sebagai alat politik bagi para pejuang di daerah ini. Kopra dijadikan sebagai alat yang dipertukarkan dengan senjata. Kondisi ini yang membuat daerah Sulawesi Selatan sangat diperhitungkan oleh pemerintah Indonesia sebagai daerah yang strategis dalam bidang ekonomi maupun politik.

Kata kunci : *Ekonomi politik, Kopra, Perdagangan*

ABSTRACT

At the beginning of independence, Indonesia was being hit by difficult times because it was carrying out arrangements in various fields. This difficulty was compounded by the various turmoils in several regions that demanded regional autonomy and even wanted to break away from the government of the Republic of Indonesia. South Sulawesi, especially in the Mandar area, cannot be separated from this turmoil, but that does not mean that the people's economic activities are paralyzed. This article attempts to elaborate on the economic history of the Mandarese people who make copra their main commodity. For this reason, the writing of this article uses historical research methods, namely: topic

determination, heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of the study show that the rise of the copra trade in the Mandar area cannot be separated from the condition of this region which is very fertile so that coconut plants as the main ingredient of copra are widely cultivated by the community. The copra commodity has improved the standard of living of the people. the welfare of the community has increased marked by the large number of pilgrims from this area. In addition, copra commodity is also used as a political tool for fighters in this area. Copra is used as a tool that is exchanged with weapons. This condition makes the South Sulawesi region highly considered by the Indonesian government as a strategic area in the economic and political fields.

Keywords: *Copra, Political economy, Trade*

PENDAHULUAN

Sejarah Indonesia khususnya wilayah Indonesia Bagian Timur merupakan wilayah yang tidak terlepas dari perbincangan dan penelitian para sejarawan lokal, nasional, bahkan internasional menyangkut masalah politik, sosial, budaya maupun ekonomi. Bahkan wilayah Indonesia bagian timur khususnya Sulawesi Selatan dalam panggung sejarah sering tampil sebagai salah satu wilayah yang patut diperhitungkan, terutama dalam bidang perdagangan.

Dalam bidang perdagangan, Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Makassar sudah terkenal sejak abad XVII sebagai wilayah strategis bagi dunia pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Makassar sebagai pesaing utama VOC dalam dunia perdagangan berlangsung sampai abad XVII. Anthony Reid menggolongkan Makassar sebagai kota metropolitan yang secara sosial sudah matang bagi perubahan ke arah borjuis, sebagai daerah pertemuan berbagai etnis dan suku bangsa dalam dunia pelayaran dan perdagangan.

Dalam ilmu ekonomi disebutkan bahwa dalam kegiatan perekonomian ada beberapa pihak yang terlibat yaitu perusahaan, pemerintah dan masyarakat (Suhada et al., 2022: 3203). Kajian tentang masalah perdagangan sebagai salah satu aktivitas penting dalam roda perekonomian suatu negara tidak terlepas dari beberapa unsur pokok yakni produsen, distribusi/penyaluran, konsumen/pemakai dan pemerintah sebagai pemegang peranan dalam menentukan kebijakan di bidang perdagangan. Beberapa komponen tersebut terdapat beberapa hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antara satu sama lain. Unsur-unsur di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dikatakan sebagai pelaku ekonomi di mana proses interaksi di antara mereka merupakan hubungan yang saling menguntungkan.

Studi tentang perdagangan pada umumnya merupakan hal yang sangat menarik, khususnya perdagangan kopra di Mandar. Perdagangan kopra yang menjadi fokus perhatian pada penelitian ini adalah yang terjadi sekitar tahun 1946-1966. Hal Ini menjadi sangat penting karena pada periode tersebut kopra menjadi komoditi utama dari daerah Mandar, sekaligus menjadi mata pencaharian masyarakat setempat.

Dalam sistuasi ketidakpastian keadaan perekonomian pada tahun 1946 diberitakan bahwa ekspor kopra masih sangat rendah, namun pada tahun 1947-1949 perdagangan kopra menjadi salah satu komoditas ekspor yang sangat menentukan

pendapatan Negara Indonesia Timur (NIT) pada masa itu. Adanya lonjakan ekspor kopra secara umum di wilayah Makassar tidak terlepas dari pengaruh kebijakan pemerintah NIT pada akhir tahun 1949, yakni untuk pertama kalinya diterima undang-undang pajak kopra oleh badan perwakilan sementara NIT yang intinya berkenan dengan urusan keuangan daerah di berbagai daerah penghasil kopra. Hal tersebut ditempuh dengan jalan memberikan intensif tunjangan pertahun dari setiap penghasil kopra di wilayah NIT. Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Najamuddin (2000: 128-129) bahwa dengan keluarnya kebijakan pemberian insentif bagi setiap daerah penghasil kopra di wilayah Negara Indonesia Timur, maka gairah masyarakat dalam penanaman dan pemeliharaan tanaman kelapa semakin meningkat.

Peralihan sistem ketatanegaraan Indonesia dari demokrasi parlementer ke masa demokrasi terpimpin pada dasarnya belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Langkah langkah yang ditempuh oleh pemerintah hanyalah berupa rehabilitasi struktur perekonomian dan penaggulangan kesulitan keuangan (Junaedi & Arsyad, 2022: 16). Langkah ini ditempuh karena masih adanya tantangan yang harus dihadapi oleh Negara Indonesia pada saat itu, dan tantangan yang paling utama ialah inflasi dalam negara. Ada beberapa hal yang menyebabkan inflasi tersebut antara lain: kekosongan kas negara karena belum adanya pajak dan bea masuk. Hal tersebut bertolak belakang dengan kondisi di mana negara saat itu mengalami banyak pengeluaran sehingga terjadi ketimpangan ekonomi (Alfatiana & Wulandari, 2022:), mata uang Jepang yang masih marak beredar di kalangan masyarakat dan susah untuk dikendalikan, ditambah lagi dengan kehadiran sekutu yang mengambil alih sistem perbankan (Abdullah & Junaidi, 2021: 234), kegiatan ekspor dan impor terhambat karena pemerintah Belanda melakukan blokade laut (Zulhendra, 2021: 43).

Ketimpangan ekonomi tesebut, tidak membuat masayarakat berpangku tangan. masyarakat yang bermukim di daerah Mandar tetap menunjukkan kreatifitas mereka dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang mereka miliki. Sebagaimana dengan daerah yang terletak di garis khatulistiwa, maka daerah Mandar memiliki iklim tropis yang mengalami pergantian musim, dari musim kemarau ke musim penghujan dan sebaliknya. Di samping itu daerah Mandar juga dikenal sebagai daerah agraris, daerah maritim karena letaknya sejajar dengan selat Makassar. Keadaan alam Mandar dihiasi dengan bukit dan lembah, terdapat hamparan tanah datar yang dilalui oleh sungai dan kali. Hamparan tanah datar yang cukup subur digarap oleh penduduk dan dijadikan lahan perkebunan, pertanian, persawahan dan peternakan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa studi tentang perdagangan kopra di Mandar merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji. Kenyataan bahwa sejarah ekonomi dewasa ini telah banyak ditulis oleh para sejarawan baik lokal maupun nasional menjadi salah satu parameter bagi para peneliti lain. Meskipun demikian masih banyak yang belum dikaji secara spesifik. Demikian halnya dengan studi perdagangan kopra, di mana para peneliti masih kurang mengungkapkan dan menjelaskannya. Pada penelitian ini penulis akan mengangkat perdagangan kopra di Mandar kurun waktu 1946-1966 sebagai salah satu obyek kajian, oleh karena perdagangan, utamanya perdagangan kopra merupakan salah satu komoditas dagang di Sulawesi Selatan terlebih lagi di Mandar pada saat itu.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan menerapkan metode penelitian kualitatif berdasarkan metode penelitian sejarah yang terdiri atas lima tahapan, yaitu penentuan topik, pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi, analisis dan penafsiran (interpretasi), dan penulisan sejarah (historiografi) (Kuntowijoyo, 2003: 27). Setelah penentuan topik dilakukan pengumpulan sumber berupa buku dan artikel jurnal yang terkait dengan topik. Sumber yang telah terkumpul kemudian diverifikasi berdasarkan permasalahan topik, kemudian dianalisis dan ditafsirkan untuk memperoleh data dan fakta, lalu dituangkan dalam bentuk narasi tertulis (historiografi) agar dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Perdagangan Kopra di Mandar

Membicarakan sejarah wilayah Indonesia bagian Timur, khususnya Sulawesi Selatan baik yang menyangkut sejarah politik maupun sejarah sosial dalam kaitannya dengan kontak hubungan pemerintah lokal dan setelah penetrasi Bangsa Barat nampaknya menempatkan perdagangan kopra sebagai faktor yang diperlukan bagi penjelasannya dan pemahamannya bahkan kehadiran wilayah ini dalam panggung sejarah banyak diwarnai dengan kegiatan perdagangan (Musyaqqat, 2021: 117). Dalam bidang perdagangan, Sulawesi Selatan yang diwakili Makassar sudah terkenal sejak abad ke XVII sebagai wilayah strategis bagi dunia pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Makassar bahkan menjadi pesaing utama VOC dalam dunia perdagangan sejak akhir abad ke XVII (Smithies, 2002: 76). Pada abad ini juga, Anthony Reid sudah menggolongkan Makassar sebagai kota metropolitan yang secara sosial sudah lama matang bagi perubahan ke arah borjuasi sebagai daerah pertemuan berbagai etnis dan suku bangsa dalam dunia pelayaran dan perdagangan (Reid, 2011: 38).

Kegiatan ekonomi masyarakat di Sulawesi Selatan memasuki abad XVIII hingga abad XIX tidak terekam oleh pemerintah Hindia Belanda, hal ini dikarenakan oleh sistem pemerintahan sentralistik yang dijalankan oleh pemerintah kolonial sejak zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels (Poelinggomang, 2016: 46). Sementara kekuasaan pemerintah di Jawa secara keseluruhan menjadi nyata, sedangkan di Luar pulau Jawa kurang mendapat perhatian dari pemerintah kolonial.

Kecenderungan sentralistik ini terus berlanjut setelah proklamasi hingga memasuki perundingan antara pemerintah Hindia Belanda untuk menyelesaikan pertikaian antara keduanya pada masa revolusi, dimana Indonesia Bagian Timur (Sulawesi Selatan di dalamnya) terabaikan dalam keputusan perjanjian Linggarjati oleh pemerintah Republik Indonesia dengan tidak dimasukkannya dalam wilayah RI secara de Facto (Susilo & Wulansari, 2021: 38). Sejak menjadi Negara Indonesia Timur, Sulawesi Selatan menjadi daerah otonom di bawah struktur kekuasaan pemerintah NIT yang mulai mengatur perekonomiannya sendiri. kebijakan awal dari pemerintah NIT dalam bidang ekonomi mengatur tata cara ekspor kopra sebagia salah satu dari beberapa daerah dalam wilayah NIT (Makkelo, 2017: 326).

Walaupun keadaan ekonomi massih jauh dari yang diharapkan, tetapi sejak memasuki sistem pemerintahan NIT memperlihatkan kecenderungan yang membaik. Secara umum aktivitas perdagangan di wilayah NIT mengalami pasang surut. Di samping masalah politik masa itu maupun terkait masalah transportasi serta distribusi barang-

barang hasil bumi ke daerah-daerah bahkan ke luar daerah. Kopra sebagai salah satu komoditi penting masa itu mengalami perkembangan jauh lebih baik daripada sebelum perang disebabkan oleh pemerintah dari pasar-pasar dunia seperti Amerika, Eropa bahkan Belanda sebagai konsumen kopra hampir 100 persen berasal dari Indonesia Timur.

Posisi strategis pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia Timur menjadi penunjang meningkatnya keuntungan ekspor kopra di wilayah ini. dalam situasi ketidak menentuan keadaan perekonomian pada tahun 1946 diberitakan bahwa ekspor kopra msih sangat rendah, namun pada tahun 1947-1949 perdagangan kopra menjadi salah satu komoditi ekspor yang sangat menentukan pendapatan Negara Indonesia Timur pada masa itu. Seperti halnya di daerah-daerah lain, daerah Mandar dalam hal ini yang beribukota di Majene adalah salah satu penghasil kopra di wilayah Indonesia Timur. Tanah Mandar merupakan salah satu Kabupaten di negara Indonesia Timur dimana mayoritas jumlah penduduknya menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian utama.

Tanaman kelapa yang banyak tumbuh di daerah Mandar diolah oleh penduduk menjadi beraneka ragam hasilnya seperti minyak kelapa yang terkenal dengan nama minna mandar. Hasilnya sebagian dikomsumsi sebagai kebutuhan rumah tangga dan sebagian pula dijual di pasar-pasar lokal juga sampai ke daerah-daerah lainnya seperti Pinrang, Pare-Pare, dan Makassar. Manfaat tanaman kelapa yang lain dapat pula dijual dalam bentuk kopra. Yang mana daerah Mandar pada masa itu memasarkan sampai ke luar wilayah Makassar melalui pelabuhan Pare-Pare seperti ke pulau Kalimantan, Jawa, Manado (Sulawesi Utara) bahkan ada yang diekspor sampai ke luar negeri melalui pelabuhan Makassar.

Akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh pada masa Negara Indonesia Timur pada waktu itu perdagangan kopra di Mandar sebagian besar dipasarkan di daerah-daerah dalam wilayah Negara Indonesia Timur. Ada indikasi kuat bahwa kopra yang berasal dari berbagai daerah-daerah di Negara Indonesia Timur masa itu ditampung di Makassar (Makkelo, 2018: 53). Dari kota inilah kemudian di ekspor ke luar negeri seperti Eropa, Amerika dan terkhusus ke Belanda.

Dinamika Perdagangan Kopra di Mandar

Lonjakan ekspor kopra secara umum di wilayah Makassar tidak terlepas dari pengaruh kebijakan pemerintah NIT pada akhir 1949 yakni untuk pertama kalinya diterima Undang-Undang pajak kopra oleh Badan Perwakilan Sementara NIT yang intinya berkenaan dengan urusan keuangan daerah di berbagai daerah penghasil kopra, dengan jalan memberikan insentif tunjangan pertahun dari setiap daerah penghasil kopra di wilayah NIT (Asba, 2006: 60). Dengan keluarnya kebijakan pemberian intensif bagi setiap daerah penghasil kopra di wilayah Indonesia Timur, gairah masyarakat dalam penanaman dan pemeliharaan tanaman ini semakin intensif. Kopra adalah salah satu faktor penunjang perekonomian rakyat pada masa pemerintahan NIT. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan perdagangan kopra yang mampu menembus pasar internasional. Bahkan Hindia Belanda menempati posisi pertama pengekspor kopra terbesar dunia (Asba, 2007: 126).

Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah pengekspor utama kopra di luar Jawa, meskipun gejolak dan situasi politik Sulawesi Selatan setelah kemerdekaan mengalami pasang surut, namun daerah ini tetap mengandalkan kopra sebagai sumber pendapatan paling dominan yang mencapai 85%. Akibat dari peningkatan penghasilan rakyat dari komoditi kopra ini, maka pada tahun 1930-an di berbagai daerah telah

didirikan Bank Kredit, seperti di Makassar, Bonthain, Selayar kemudian Wadjo membentuk Bank Rakyat sendiri, juga di Onder Afdeling Mandar. Pada umumnya Bank Kredit ini bertujuan membantu para petani untuk membayarkan utangnya kepada tengkulak yang menghubungkan antara desa dan kota. Sebagain dari hasil mereka digunakan untuk membiayai pendidikan keluarga mereka, naik haji dan menginvestasikan modal mereka melalui perluasan areal perkebunan (Najamuddin, 2000: 63).

Peralihan sistem ketatanegaraan Indonesia dari demokrasi perlementer ke masa demokrasi terpimpin pada dasarnya belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Langkah-langkah yang ditempuh hanyalah berupa rehabilitasi struktur perekonomian dan penanggulangan kesulitan keuangan. Ketika itu belum ada pemikiran dan upaya untuk menaikkan tindakan laju pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Walau laju pertambahan penduduk mulai terasa, seiring dengan perpindahan penduduk ke daerah perkotaan yang lebih berhubungan dengan persoalan keamanan (Leirissa, 1996: 17).

Peralihan sistem ketatanegaraan dan berbagai ketegangan politik dan keamanan di berbagai wilayah Indonesia dapat dirasakan pula oleh Sulawesi Selatan pada waktu itu. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh (Gonggong, 2004: 31) bahwa pada masa awal penyerahan kembali kemerdekaan, 1951 keadaan pemerintah Sulawesi Selatan memang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tidak saja disebabkan oleh karena keadaan Sulawesi Selatan sendiri, melainkan karena adanya ketidak tegasan peraturan dan pemerintah pusat Jakarta.

Kemacetan pemerintahan pada hampir semua daerah di Sulawesi Selatan terjadi, dalam arti pemerintahan di Sulawesi Selatan ketika itu terdapat dualisme pemerintahan, karena suatu daerah tidak sepenuhnya berada di bawah pemerintahan RI, melainkan juga berada di bawah kekuasaan DI/TII. Sebagai contoh daerah Sinjai yang terbagi dalam 5 distrik, ternyata 3 distrik sepenuhnya secara de facto dikuasai oleh DI/TII, demikian pula halnya dengan daerah-daerah lainnya yang memang merupakan sebagai pusat kekuatan dari gerakan pemberontakan ini seperti: Palopo, Bone dan Mandar.

Tidak stabilnya pemerintahan pada hampir semua daerah di wilayah Sulawesi Selatan dengan sendirinya memberikan pula pengaruh pada aspek lainnya, terutama menyangkut perekonomian daerah tersebut. Memang tidak mudah bagi pemerintah untuk mengatur, karena sumber-sumber perekonomian yang ada di daerah-daerah pedalaman dikuasai secara de facto oleh pemerintah NII (Negara Islam Indonesia) di daerah yang bersangkutan. Dua komoditi penting di Sulawesi Selatan, yaitu beras dan kopra, dapat dikatakan berada di bawah kontrol gerakan DI/TII (Gonggong, 2004: 41). Hal ini dapat disimpulkan bahwa Sulawesi Selatan pada awalnya sebagai basis Negara Indonesia Timur menguasai perdagangan kopra secara umum akan tetapi gerakan DI/TII akhirnya mengambil alih peran tersebut.

Daerah Mandar sebagai salah satu pusat gerakan ini yaitu di Polewali menjadi daerah penghubung untuk jalur perdagangan, karena letak yang strategis yaitu dekat dengan pelabuhan Pare-Pare. Dalam kaitan ini ada memang suatu permainan menarik untuk diketahui antara penguasa militer setempat dengan DI/TII dalam arti ada hubungan yang memungkinkan distribusi kedua komoditi itu yang dikuasai oleh DI/TII. Tetapi kedua belah pihak nampaknya mempunyai penghubung untuk melakukan perdagangan yang saling menguntungkan (Sainal, 2017: 30).

Letkol Andi Selle misalnya, mempunyai perusahaan PT. Pembangunan yang berhasil mengirimkan pedagang-pedagangnya sampai ke pelosok-pelosok daerah kekuasaannya untuk membeli kopra dan beras. Ketika itu kekuasaan Andi Selle, sampai tahun 1962, merupakan daerah-daerah yang strategis untuk melakukan penyelundupan kedua komoditi ini (Anwar, 2018: 238). Kota Surabaya dan Gresik merupakan daerah yang erat hubungannya dengan pengiriman beras dan kopra. Periode 1956-1961, dari Polewali (Mandar) yaitu kota pusat kekuasaan Andi Selle sangat ramai dikunjungi kapal-kapal asing. Kapal itu bertujuan untuk mengangkut kopra dengan sistem barter. Pada umumnya daerah tujuannya adalah Singapura. Pada periode itu tampaknya ada kebebasan yang diperoleh Andi Selle untuk melakukan perdagangan barter kopra.

Untuk itu ia memperoleh senjata-senjata jenis tertentu dan kendaraan lapis baja tertentu. Apa yang dilakukan oleh Andi Selle nampaknya juga dilakukan oleh Andi Sose karena sebagai komandan Korem itu mengauasai daerah-daerah penghasil kedua komoditi itu. Hubungan antara Abdul Kahar Muzakkar dengan Andi Selle digambarkan oleh Bahar Mattalioe sebagai hubungan yang luar biasa (Subair, 2018b: 32). Selama bertahun-tahun mereka menjalin kerja sama bukan saja hubungan dalam politik dan ideologis, melainkan digambarkan aspek yang tidak kalah pentingnya yaitu hubungan dagang (Subair, 2018a). Ada kemungkinan peluru dan senjata-senjata berat dan ringan yang menjadi alat dalam perang dan mempertahankan diri diperoleh dari perdagangan kopra yang menjadi komoditas perekonomian pada masa pemerintahan Andi Selle. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Gonggong, 2004: 47) bahwa hubungan gerakan DI/TII dengan perdagangan kopra dijelaskan dalam salah satu surat Abdul Qahhar Mudzakkar kepada Andi Selle sebagai komandan RTP 45. Dijelaskan dalam surat tersebut bahawa Qahhar bersedia mengatur perdagangan kopra untuk komandan operasi itu. Jika syarat-syarat yang diajukannya dapat disetujui oleh Andi Sose.

Penguasaan sumber-sumber ekonomi pedalaman oleh DI/TII tentu saja menyulitkan kehidupana rakyat pada umumnya tidak saja mereka yang terpaksa menyingkir ke daerah-daerah lain untuk menghindari kekacauan, kesulitan hidup itu juga dilamai oleh mereka yang mencoba bertahan. Hal itu disebabkan oleh kehadiran sumber hidup di tempat lain. Mereka bergantung pada tanah persawahan yang letaknya di daerah yang dikuasai oleh gerakan DI/TII. Hasil-hasil pertanian mereka tidaklah dinikmati oleh mereka, melainkan oleh anggota DI/TII. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan kerjasama antara DI/TII dengan para komandan militer setempat dalam rangka mewadahi kelangsungan gerakan mereka. Ini terbukti bahwa DI/TII sangat lihai dalam mengatur kegiatannya baik dari segi ekonomi maupun politik.

Pada kerjasama tersebut di dalamnya terdapat bagian-bagian yang menguisahakan pembelian senjata melalui sistem barter, baik dengan luar negeri maupun dalam negeri. Organisasi ini berpusat di Mamuju (Mandar). Ketika itu DI/TII dapat mengeluarkan hasil bumi per kwintal (a) kopra sebanyak 1200 ton, (b) rotan sebanyak 800 ton (c) damar sebanyak 400 ton dan (d) kopi sebanyak 100 ton. Dalam melaksanakan barternya itu di samping mengirimkan orang-oarang untuk menghubungi perwakilan-perwakilan asing, nampaknya peranan pedagang Cina sangat besar. Konsul asing yang dihubungi itu antara lain Konsul Inggris dan Konsul Amerika Serikat di Singapura. Salah satu nama yang disebutkan oleh Khi King Lang yang dihubungi untuk pelaksanaan barter-barter mereka.

Peristiwa pemberontakan DI/TII bukan hanya berdampak pada keadaan politik masyarakat Sulawesi Selatan tetapi berdampak pula terhadap keadaan ekonomi. Hal tersebut digambarkan oleh (Gonggong, 2004: 48) bahwa keadaan kacau balau yang berlangsung selama sekian tahun tentu akibatnya sangat terasa bagi masyarakat setempat,

Sulawesi Selatan sejak dahulunya terkenal sebagai daerah yang kaya akan beras, bahkan demikian kayanya daerah ini merupakan daerah pemasok beras untuk Indonesia Timur dan Kalimantan. Akan tetapi dengan adanya pemberontakan itu, Sulawesi Selatan pernah mengalami apa yang disebut kekurangan beras.

Situasi perekonomian yang digambarkan itu tidak dapat dipisahkan dari keadaan sosial dan ketentraman masayarakat pada periode ini. suatu hal yang sangat memprihatinkan setidak-tidaknya sampai pada tahun 1950-an dan terutama di daerah pedalaman ialah bidang pendidikan. Dapat dikatakan bahwa bidang ini cukup terlantar. Ketidakpastian politik pada waktu itu dapat berdampak pada perekonomian termasuk perdagangan kopra. Bila kopra tahun 1949 dikuasai oleh NIT, maka pada tahun 1950-an dan setelahnya sebagian besar daerah-daerah yang dikuasai oleh DI/TII pimpinan Qahhar Muzakkar secara *de facto* menjadikan kopra sebagai alat untuk melakukan barter senjata dan pakaian tentara.Bagian ini menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan yang sesuai dengantujuan penelitian

Dampak Perdagangan Kopra

Berdasarkan uraian sebelumnya tentang perkembangan perdagangan kopra dari masa ke masa, hal penting yang perlu digaris bawahi adalah dampak yang ditimbulkan dari adanya perdagangan kopra kurun waktu (1946-1966) secara umum pengaruh atau dampak yang ditimbulkan adalah :

1. Sosial Ekonomi

Dinamika perdagangan kopra tidak terlepas dari aspek sosial ekonomi masyarakat Mandar, pada kurun waktu 1946-1956 kopra sebagai salah satu komoditi ekspor hasil pertanian/perkebunan mengalami perkembangan yang pesat, akibatnya kopra menjadi salah satu andalan komoditi dalam bidang perekonomian pada masa itu. Perdagangan yang sebagian besar didominasi oleh kaum bangsawan ini banyak menghasilkan keuntungan yang besar. Kehidupan masyarakat Mandar menjadi makmur karena ditunjang oleh penghasilan dari berdagang kopra, selain itu ditambah lagi dengan hasil bumi lainnya. Hal ini diperkuat dengan apa yang dipaparkan oleh (Hasanuddin, 2019: 264) bahwa dalam kurun waktu tersebut jumlah jamaah haji yang berangkat ke tanah suci Mekah mengalami peningkatan, meskipun pada waktu itu masih menggunakan kapal laut. Demikian halnya yang dikemukakan oleh (Najamuddin, 2000: 53) bahwa Daerah Mandar sebagai penghasil kopra setiap tahun memberangkatkan jamah haji yang cukup banyak. Jumlah tersebut diurai oleh (Akbar, 2021: 183) bahwa Jemaah Haji dari Daerah Mandar dari tahun 1947-1950 berjumlah 498 orang. Hal tersebut membuktikan bahwa masayarakat Mandar pada masa itu berada pada tingkat kemakmuran. Perkembangan tersebut merupakan pencerminan dari perubahan struktural dalam proses ekonomi sendiri. meningkatnya permintaan akan komoditi kopra membuka peluang dan kesempatan berusaha bagi masyarakat, khususnya petaniu kelapa dalam menyediakan bahan berupa kopra yang selanjutnya diolah menjadi produk baru, seperti pembuatan *margarine*.

Realitas sosial lainnya adalah banyak dari lapisan sosial bawah melakukan mobilitas sosial secara vertikal seperti “tausamar” (orang biasa) naik ke Taupia (lapisan pembantu raja). Hal ini dikarenakan perekembangan perdagangan kopra membuat masyarakat pendukungnya menjadi kaya. Peningkatan permintaan akan kopra diiringi

dengan harga yang lebih baik, memungkinkan mereka dapat mengangkat derajat dan status sosialnya, sebagiamana diketahui bahwa salah satu keistimewaan yang harus dimiliki dalam melakukan mobilitas sosial secara vertikal adalah seseorang harus memiliki kekayaan (*Tosugi*).

Mobilitas sosial yang terjadi pada masyarakat Mandar pada saat itu sesuai dengan konsep yang diajukan oleh (Syani, 1995: 16) bahwa dalam pelapisan sosial masyarakat yang terbuka, ada peluang atau kesempatan bagi masyarakat untuk menempati posisi yang berubah dalam masyarakat. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan dengan mengoptimalkan usaha untuk merubah taraf hidup dari kategori miskin menjadi kategori kaya. Salah satu parameter untuk menilai strata sosial seseorang adalah banyaknya harta atau kekayaan.

2. Politik

Sulawesi Selatan merupakan sebuah negara yang paling berkembang di antara negara-negara federal yang dibentuk oleh Belanda pada tahun 1945-1949. Kehadiran NIT dalam lembar sejarah masyarakat Sulawesi Selatan khususnya sangat berpengaruh di segala aspek kehidupan masyarakatnya. Perdagangan kopra pada masa itu merupakan komoditas andalan dari NIT yang menjadi tulang punggung perekonomian negara. Usaha dalam perkopraan pada masa NIT mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

Pengaruh perdagangan kopra berlanjut pada pergerakan lokal yaitu gerakan DI/TII, gerakan yang berlangsung kurang lebih lima belas tahun ini mengisahkan dampak yang cukup signifikan. Meskipun kondisi pada masa itu diwarnai oleh kekacauan di segala aspek kehidupan. Daerah-daerah di Sulawesi Selatan pada umumnya dikuasai oleh DI/TII dan sebagian kecil lainnya oleh pemerintah RI. Kemacetan pemerintahan pada hampir semua daerah di wilayah Sulawesi Selatan khususnya Mandar berdampak pada perekonomian. Hal ini sebagai akibat dari adanya kegiatan perdagangan kopra dan tata niaganya sepenuhnya diatur oleh DI/TII.

Perdagangan kopra pada masa DI/TII (1950-1964) merupakan salah satu modal penting dalam melakukan perjuangan, di samping sebagai salah satu pendukung perjuangan. Para pemimpin pemberontak mengelola ekspor kopra ke mancanegara kemudian membeli dan mendapatkan senjata-senjata sebagai alat perjuangan gerakan DI/TII tersebut. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh (Amir, 2019: 130) bahwa pada periode 1956-1961 dan Polewali sebagai pusat kegiatan Andi Selle sangat ramai dikunjungi kapal-kapal asing. Kapal itu bertujuan untuk mengangkut kopra dengan sistem barter (Asba, 2015: 201). Pada umumnya tujuannya adalah Singapura. Pada masa ini nampaknya ada kebebasan yang diperoleh Andi Selle untuk melakukan perdagangan barter kopra untuk ia memperoleh senjata-senjata dan kendaraan tempur (Nas, 2014: 198).

Situasi perekonomian tersebut juga berdampak pada aspek-aspek lainnya, akan tetapi catatan penting yang harus kita ketahui adalah sampai pada akhir tahun 1964 perdagangan kopra tetap menjadi salah satu primadona andalan di Tanah Mandar yang telah mampu mengangkat sebagian masyarakatnya yang hidup sebagai petani maupun pedagang pada masa itu. Meskipun dalam kondisi politik yang tidak menentu mereka tetap bertahan dan berusaha menjadikan kopra sebagai komoditas andalan perdagangan.

SIMPULAN

Mandar merupakan suku bangsa di Nusantara yang budayanya berorientasi pada laut, namun demikian suku Mandar juga menggarap tanah sebagai sumber penghidupan dengan mengembangkan berbagai jenis komoditi pertanian/perkebunan seperti kelapa yang dapat dijadikan sebagai kopra. Munculnya perdagangan kopra di Mandar disebabkan oleh adanya hubungan persekutuan dan pengaruh kerajaan Gowa. Selain itu merupakan jalur penghubung dan pusat perdagangan rempah-rempah di wilayah Sulawesi Selatan dan daerah-daerah lain di luar Sulawesi. Perdagangan kopra di Mandar diawali oleh kedatangan para pedagang dari Makassar. Kebanyakan dari mereka adalah bangsa Tionghoa. Selain itu ada pula karena permintaan dari luar Sulawesi, antara lain Kalimantan, Jawa, di mana harga kopra pada masa itu nilai jualnya cukup tinggi. Selain itu tidak terlepas pula dari potensi wilayah Polewali Mamasa yang sebagian besar daerahnya banyak ditumbuhi pohon kelapa.

Daerah Mandar sebagai salah satu pusat gerakan DI/TII ini yaitu di Polewali menjadi daerah penghubung untuk jalur perdagangan, karena letak yang strategis yaitu dekat dengan pelabuhan Pare-Pare. Penguasaan sumber-sumber ekonomi pedalaman oleh DI/TII tentu saja menyulitkan kehidupan rakyat pada umumnya tidak saja mereka yang terpaksa menyingkir ke daerah-daerah lain untuk menghindari kekacauan, kesulitan hidup itu juga dialami oleh mereka yang mencoba bertahan. Hal itu disebabkan oleh kehadiran sumber hidup di tempat lain. Mereka bergantung pada tanah persawahan yang letaknya di daerah yang dikuasai oleh gerakan DI/TII. Hasil-hasil pertanian mereka tidaklah dinikmati oleh mereka, melainkan oleh gerakan DI/TII. Peristiwa pemberontakan DI/TII bukan hanya berdampak pada keadaan politik masyarakat Sulawesi Selatan tetapi juga pada keadaan ekonomi masyarakat. Situasi perekonomian yang digambarkan itu tidak dapat dipisahkan dari keadaan sosial dan ketentraman masyarakat pada periode itu. Ketidakpastian politik pada waktu itu berdampak pada perekonomian termasuk perdagangan kopra.

Pasang surut perdagangan kopra telah memberikan pengaruh dan dampak yang sangat besar bagi masyarakat pendukungnya. Di bidang ekonomi, perdagangan kopra memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya di kalangan petani dan pedagang itu sendiri yang diakibatkan oleh semakin membaiknya harga kopra. Peningkatan pendapatan masyarakat diikuti pula oleh peningkatan status sosial masyarakat yang menempatkan mereka pada golongan orang-orang kaya yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di bidang politik, kopra dijadikan sebagai salah satu aset dalam memberikan dukungan perjuangan baik oleh NIT dan DI/TII.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A., & Junaidi, T. (2021). Melawan Dengan Uang: Eksistensi Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (Urips) Terhadap Peredaran Uang Nica Dan Jepang Di Sumatera 1947-1949. *Seuneubok Lada: Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya Dan Kependidikan*, *8*(02), 232–239.

Akbar, A. (2021). Haji Sulawesi Selatan Pada Masa Negara Indonesia Timur (Nit)(1946-1950). *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, *4*(2), 179–197.

Alfatiana, L., & Wulandari, A. (2022). Di Balik Layar Penyelundupan: Tokoh-Tokoh dalam Perdagangan Gelap Pemerintah Republik di Singapura, 1947-1949. *Lembaran Sejarah*, *18*(1), 63–75.

Amir, M. (2019). Pelayaran Niaga Mandar pada Abad XX. *Walasuji*, *10*(2), 121–137.

Anwar, H. (2018). Dinamika Tata Niaga Kopra di Minahasa (1946-1958). *Patanjala*, *10*(2), 291747.

Asba, A Rasyid. (2006). Integrasi Ekspor Kopra Makassar diantara Kontinuitas dan Diskontinuitas. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, *10*(2), 58–69.

Asba, Abdul Rasyid. (2007). *Kopra Makassar: Perebutan Pusat dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.

Asba, Abdul Rasyid. (2015). Makassar Copra as a Trigger of Struggling for Power between Central and Local Government: A Historical Study of Regional Political Economy in Indonesia. *Tawarikh*, *6*(2).

Gonggong, A. (2004). *Abdul Kahar Muzakakar: Dari Patriot Hingga Pemberontak.* Yogyakarta: Ombak.

Hasanuddin, H. (2019). Pelayaran Niaga, Bajak Laut, Perkampungan Pedagang Di Gorontalo. *Walasuji*, *9*(2), 261–275.

Junaedi, D., & Arsyad, M. R. (2022). Tatakelola Utang dan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, *1*(1), 1–21.

Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Leirissa, R. Z. (1996). *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Makkelo, I. (2018). Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota Makassar pada Abad ke-20. *Jurnal Sejarah*, *1*(2).

Makkelo, I. D. (2017). Penataan Kota dan Masyarakat Perkotaan: Makassar Sebagai Ibukota Negara Indonesia Timur (NIT) 1946-1950. *Sasdaya: Gadjah Mada Journal of Humanities*, *2*(1), 315–333.

Musyaqqat, S. R. (2021). Jaringan Perdagangan Beras dan Dinamika Pelabuhan Ekspor di Sulawesi Selatan pada 1930-an. *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, *4*(2), 113–139.

Najamuddin. (2000). *Sulawesi Selatan: Pergumulan Antara Negara Federal dan Negara Kesatuan 1946-1949*. Universitas Indonesia.

Nas, J. (2014). Konflik antar Elite Politik Lokal di Sulawesi Selatan: Sebuah Perspektif Sejarah. *SOSIOHUMANIKA*, *7*(2).

Poelinggomang, E. L. (2016). *Makassar abad XIX*. Kepustakaan Populer Gramedia.

Reid, A. (2011). *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 2: Jaringan Perdagangan Global*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sainal, A. (2017). Andi Selle dalam Pergolakan Bersenjata di Sulawesi Selatan (1950-1964). *Yupa: Historical Studies Journal*, *1*(1), 26–37.

Smithies, M. (2002). Accounts of the Makassar Revolt, 1686. *Journal of the Siam Society*, *90*(1/2), 73–100.

Subair, A. (2018a). DI/TII Sulawesi-Selatan: Politik Ekonomi Di Tengah Konflik 1953-1959. *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya: Tebar Science*, *2*(2), 28–41.

Subair, A. (2018b). *Jaringan Perdagangan Senjata Pad Masa Gerakan DI/TII Sulawesi Selatan 1950-1965*. Universitas Negeri Makassar.

Suhada, D. I., Rahmadani, D. R., Rambe, M., Fattah, M. A. F., Hasibuan, P. F., Siagian, S., & Wulandari, S. (2022). Efektivitas Para Pelaku Ekonomi dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *2*(10), 3201–3208.

Susilo, A., & Wulansari, R. (2021). Perjanjian Linggarjati (Diplomasi dan Perjuangan Bangsa Indonesia Tahun 1946-1947) *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, *10*(1), 30–42.

Syani, A. (1995). *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat: Suatu Interpretasi Kearah Realitas Sosial*. Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya.

Zulhendra, J. (2021). Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia Pada Zaman Kemerdekaan. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, *9*(2 November), 41–49.